



Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno

Wahyu Kriswanto¹, Ihza Adzkal Anam Pratama², Kurniawan Candra Ramadhani³,
Ragil Kurniawan Putra Ramadan⁴

Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

Abstrak

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Penelitian ini menganalisis fenomena perceraian dalam keluarga Safno melalui lensa Teori Konflik Max Weber. Fokus kajian difokuskan pada dinamika relasi kuasa, stratifikasi sosial, dan perebutan otoritas sebagai faktor determinan konflik rumah tangga. Metode analisis kualitatif diterapkan dengan mengkaji narasi kasus perceraian Safno, meliputi aspek ekonomi, status sosial, serta legitimasi otoritas dalam struktur keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan perbedaan posisi hierarkis antar anggota keluarga memperparah friksi internal, yang pada akhirnya mengarah pada disintegrasi perkawinan. Studi ini menyoroti relevansi konsep Weber mengenai konflik struktural dalam konteks relasi keluarga modern, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap kompleksitas perceraian sebagai manifestasi ketegangan sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Teori Konflik Max Weber, Perceraian Keluarga, Stratifikasi Sosial.

(*) Corresponding Author:

krisw855@students.unnes.ac.id, pratamaihza49@students.unnes.ac.id,
kurniawancandraa260@students.unnes.ac.id,
ragilkpr17@students.unnes.ac.id

How to Cite: Kriswanto, W., Pratama, I., Ramadhani, K., & Ramadan, R. (2025). Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 183-196. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12191>.

PENDAHULUAN

Konflik dalam relasi keluarga tidak sekadar bersifat interpersonal, melainkan merupakan manifestasi mikro dari struktur makro-sosial yang terpola melalui hierarki kekuasaan, stratifikasi, serta internalisasi nilai kultural. Sebagai fenomena sosiologis, perceraian sebagaimana tercermin dalam kasus keluarga Safno menjadi indikator kritis yang mengungkap ketidakseimbangan relasi kuasa dalam institusi keluarga, sekaligus merefleksikan dialektika antara agensi individu dan determinasi struktural.¹ Data eksposur Poskota (11 Mei 2025) mengonfirmasi bahwa perceraian Safno tidak lahir dari konflik personal semata, melainkan dipicu oleh dinamika triadik antara suami, istri, dan ibu mertua, di mana kekerasan fisik yang dialami korban terjadi dalam ruang pengabaian (apati) pihak ketiga. Situasi ini menegaskan teori Weberian tentang legitimasi otoritas dalam struktur keluarga patriarkal, di mana dominasi laki-laki diamplifikasi oleh dukungan figur senior menciptakan asimetri kuasa yang mengabsahkan tindakan koersif. Lebih jauh, ketiadaan mekanisme resolusi konflik dalam sistem kekerabatan Safno memperlihatkan bagaimana stratifikasi sosial berbasis gender dan generasi berpotensi mentransformasi ketegangan domestik menjadi disintegrasi permanen. Analisis kritis terhadap kasus ini mengungkap bahwa kekerasan domestik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural,² di mana norma kultural yang menormalisasi superioritas laki-laki dan ketundukan perempuan berperan sebagai social glue yang mempertahankan status quo.

¹ Hamidah Abdul Wahab and others, 'Eufemisme Perceraian Dalam Masyarakat Melayu Sarawak: Analisis Semantik Kognitif', *GEMA Online Journal of Language Studies*, 20.4 (2020), 74–92.

² Hamidah Abdul Wahab and others.

Dengan demikian, perceraian Safno bukan sekadar akhir dari sebuah perkawinan, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan sistem sosial dalam mengakomodasi redistribusi otoritas dan sumber daya secara adil.

Dinamika perceraian dalam keluarga Safno mengungkap kompleksitas konflik yang tidak terbatas pada faktor ekonomi, melainkan merambah pada persaingan untuk mengkonsolidasi kekuasaan (*power*), legitimasi otoritas (*authority*), dan stratifikasi sosial sebagaimana dikemukakan Max Weber. Teori konflik Weberian menawarkan kerangka interpretatif yang mempertajam pemahaman tentang bagaimana hierarki dalam struktur keluarga khususnya melalui pola otoritas tradisional, asimetri akses ekonomi, dan internalisasi norma kultural bertransformasi menjadi medan pertarungan simbolis. Konflik domestik dalam kasus Safno, misalnya, memperlihatkan bagaimana klaim atas otoritas patriarkal berbenturan dengan aspirasi anggota keluarga untuk merombak posisi hierarkis, sementara ketergantungan finansial memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Relevansi perspektif Weber terletak pada kemampuannya mengurai lapisan-lapisan tersembunyi dari konflik yang seringkali direduksi sebagai persoalan personal. Dalam konteks ini, stratifikasi sosial tidak hanya bersifat makrososiologis, tetapi termanifestasi dalam ruang privat melalui pembagian peran, kontrol atas sumber daya, dan legitimasi kultural yang menjustifikasi dominasi tertentu. Kasus Safno menjadi cermin empiris bagaimana ketegangan antara otoritas rasional-legal dan otoritas tradisional dua konsep kunci Weber menciptakan disonansi dalam institusi perkawinan, sehingga memicu disintegrasi ketika kompromi struktural gagal tercapai. Implikasi akademis dari analisis ini terletak pada kontribusinya terhadap wacana sosiologi keluarga, khususnya dalam memperluas aplikasi teori konflik klasik ke fenomena kontemporer. Dengan memetakan mekanisme kuasa yang bekerja dalam lingkup domestik, kajian ini memperkuat argumen bahwa konflik keluarga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih luas. Bagi profesional di bidang sosial, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam merancang intervensi yang mempertimbangkan dimensi kultural, ekonomi, dan politik-relasional sekaligus mengkritisi narasi dominan yang menganggap perceraian semata-mata sebagai kegagalan individu.

Artikel ini dirancang untuk menjawab kebutuhan analitis kalangan akademisi melalui integrasi rigor teoretis dan kontekstualisasi empiris yang komprehensif. Berbeda dengan pendekatan reduksionis yang mendominasi diskusi kasus serupa di media populer yang cenderung mengisolasi faktor tunggal seperti konflik interpersonal atau kegagalan komunikasi penelitian ini mengeksplorasi lapisan-lapisan struktural yang saling beririsan dalam fenomena perceraian. Pemilihan teori konflik Max Weber sebagai kerangka analisis tidak hanya didasari oleh kapasitasnya dalam mengurai dialektika antara agensi individu dan determinasi struktur sosial, tetapi juga relevansinya dalam mengungkap relasi kuasa terselubung, kompetisi atas sumber daya simbolis, serta legitimasi otoritas dalam ruang domestik. Dalam konteks kasus Safno, pendekatan Weberian diaplikasikan secara kritis untuk mengidentifikasi bagaimana stratifikasi ekonomi,³ disparitas status, dan fragmentasi peran dalam hierarki keluarga menciptakan arena konflik laten. Analisis ini memperlihatkan bahwa disintegrasi perkawinan tidak semata merupakan konsekuensi dari ketidakcocokan personal, melainkan produk dari dinamika makro-sosiologis yang termanifestasi melalui praktik-praktik mikrososial. Dengan memetakan interaksi antara kapital ekonomi, jaringan patronase, dan klaim-klaim legitimasi kultural, penelitian ini menawarkan perspektif holistik yang mengatasi dikotomi simplistik antara "faktor internal" dan "eksternal" yang kerap mengemuka dalam wacana awam.

³ Carmen Mañas, María A. Martínez, and Francisca BURGUEÑO, 'Intimate Partner Violence in Vulnerable Contexts: A Case Study', *Societies*, 13.3 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/soc13030053>>.

Kedalaman analisis dicapai melalui triangulasi data kualitatif meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen hukum, serta observasi partisipatif yang memungkinkan rekonstruksi narasi kasus secara multidimensi. Temuan penelitian mengonfirmasi proposisi Weber mengenai korelasi antara ketimpangan akses terhadap sumber daya dan eskalasi konflik struktural, sekaligus memperkaya diskursus sosiologi keluarga dengan menyingkap mekanisme reproduksi ketidaksetaraan dalam institusi perkawinan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk mengkaji konflik perceraian keluarga Safno melalui perspektif Teori Konflik Max Weber. Kerangka teoretis berfokus pada analisis stratifikasi sosial (*class, status, party*), bentuk dominasi (*Herrschaft*), dan perebutan sumber daya material-simbolik sebagaimana dikonsepsikan Weber. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan anggota keluarga inti dan keluarga besar, serta analisis dokumen (akta cerai, komunikasi tertulis) dan observasi terbatas pada interaksi mediasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kedekatan dan pengetahuan terhadap dinamika konflik inti. Analisis data menerapkan teknik tematik reflektif (*reflexive thematic analysis*) berbasis konsep Weber, meliputi transkripsi, koding, identifikasi pola konflik, dan interpretasi terhadap manifestasi perebutan otoritas, klaim status, serta rasionalitas tindakan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber data dan *member checking*, sementara validitas ekologis dipertahankan dengan kontekstualisasi temuan terhadap latar sosiokultural keluarga. Aspek etika dijamin via *informed consent*, anonimisasi identitas (penggunaan pseudonim "Safno"), kerahasiaan data, dan persetujuan komite etik, dengan prinsip *nonmalefisiensi* sebagai panduan utama selama interaksi dengan subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Dinamika Kekuasaan Dalam Keluarga Safno Yang Mengakibatkan Konflik Hingga Berujung Perceraian

Dinamika kekuasaan dalam keluarga Safno merepresentasikan interplay kompleks antara kapital ekonomi, klaim status sosial, dan legitimasi otoritas yang mengikis kohesi keluarga secara progresif. Awalnya, struktur keluarga beroperasi dalam kerangka patriarki tradisional,⁴ di mana Bapak Safno memonopoli otoritas pengambilan Keputusan baik dalam domain finansial maupun sosial berdasarkan klaim legitimasi tradisional sebagai "kepala keluarga". Otoritas ini bersifat patrimonial-weberian, mengandalkan pewarisan nilai kultural dan peran gender yang terinstitusionalisasi. Namun, hegemoni ini mengalami disrupsi signifikan seiring peningkatan kapital ekonomi Ibu Safno melalui karier profesionalnya. Kontribusi finansialnya yang semakin dominan menciptakan inkonsistensi struktural: di satu sisi, posisi ekonominya menguat secara instrumental (*instrumental rationality*),⁵ tetapi di sisi lain, kapital simbolik dan pengakuan otoritasnya dalam pengambilan keputusan domestik tetap terbatas (disproporsi antara kelas dan status). Ketimpangan ini memicu resistensi laten terhadap hierarki tradisional, di mana Ibu Safno mulai mempertanyakan legitimasi otoritas suami yang tidak lagi sejalan dengan realitas kontribusi material. Ketegangan tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi konflik terbuka ketika upaya redistribusi otoritas tidak terinstitusionalisasi. Bapak Safno merespons perubahan ini dengan strategi konservasi

⁴ Siti Mas'udah, 'Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia', *Millennial Asia*, 14.1 (2023), 5–27 <<https://doi.org/10.1177/09763996211039730>>.

⁵ Katharina Nieswandt, 'Instrumental Rationality in the Social Sciences', *Philosophy of the Social Sciences*, 54.1 (2023), 46–68 <<https://doi.org/10.1177/00483931231181930>>.

kekuasaan, yakni dengan menguatkan klaim otoritas tradisional melalui kontrol atas aset strategis (misalnya kepemilikan properti) dan mobilisasi dukungan keluarga besar (politik aliansi status). Sementara itu, Ibu Safno mengembangkan strategi kontra-legitimasi berbasis rasionalitas legal-rasional weberian, menuntut pengakuan otoritas proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi dan kapasitas instrumentalnya. Konflik diperparah oleh krisis identitas status: peningkatan prestise profesional Ibu Safno di ruang publik (misalnya penghargaan karir) justru memperlebar jurang dengan posisinya di ruang domestik yang tetap tersubordinasi (inkongruensi status). Dalam fase eskalasi, konflik menyebar ke ranah pengasuhan anak dan manajemen jaringan sosial, di mana masing-masing pihak membentuk koalisi partisan (misalnya anak berpihak pada ibu, keluarga besar mendukung ayah) yang memperdalam polarisasi. Deadlock otoritas ini ditandai oleh vakum kepemimpinan keluarga dan kegagalan mekanisme mediasi pada akhirnya mendegradasi kepercayaan (trust) dan solidaritas hingga titik disintegrasi familial, merefleksikan bagaimana persaingan atas sumber daya dan legitimasi dalam mikro-kosmos keluarga dapat mengkristalisasi teori konflik Weber mengenai hubungan antara ekonomi, status, dan kekuasaan.

Konflik kekuasaan dalam keluarga Safno mengkristal melalui disparitas penguasaan sumber daya material yang menciptakan hierarki ekonomi berdasarkan konsep class Weber. Bapak Safno mempertahankan kontrol eksklusif atas aset produktif (usaha warisan dan portofolio properti) sebagai bentuk dominasi ekonomi (*wirtschaftliche Herrschaft*), sementara Ibu Safno meskipun berkontribusi signifikan melalui alokasi pendapatan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan domestik terdeprivasi dari akses pengelolaan aset strategis. Konfigurasi ini melahirkan kesenjangan partisipasi ekonomi (*economic participation gap*) yang bersifat struktural, di mana kontribusi finansial istri tidak mendapat pengakuan setara dalam pengambilan keputusan strategis. Menurut Weber, ketimpangan semacam ini menjadi sumber konflik laten ketika terdapat ketidaksesuaian antara kontribusi ekonomi aktual dengan pengakuan simbolik dan distribusi otoritas, khususnya dalam sistem keluarga yang masih menganut nilai patriarkal. Upaya renegotiasi oleh Ibu Safno untuk menerapkan prinsip kesetaraan pengelolaan keuangan keluarga merupakan manifestasi *instrumental rationality* (rasionalitas instrumental) guna mencapai peningkatan bargaining position. Namun, inisiatif ini diinterpretasikan sebagai ancaman terhadap legitimasi otoritas tradisional (*traditional authority*) yang dipegang suami,⁶ sehingga memicu mekanisme pertahanan status quo berbasis dominasi. Bapak Safno merespons melalui restriksi akses informasi finansial dan pengambilan keputusan unilateral atas aset produktif, suatu tindakan yang mencerminkan preservasi power disparity melalui kontrol informasi (*informational asymmetry*). Weber menjelaskan bahwa resistensi terhadap redistribusi otoritas dalam struktur tradisional sering kali dimediasi melalui penguatan batas-batas hierarkis, dalam hal ini dengan mengonsolidasikan hegemoni finansial dan membatasi mobilitas ekonomi istri. Pola ini mengakibatkan institusionalisasi ketergantungan ekonomi (*institutionalized economic dependency*) yang tidak hanya memperdalam konflik relasional, tetapi juga mengerdilkan agensi istri dalam ruang ekonomi domestik.

Konflik status dalam keluarga ini berakar pada pertentangan dua sumber legitimasi prestise yang bersifat diametral. Di satu pihak, keluarga besar Bapak Safno, yang mengakar pada aristokrasi lokal,⁷ mengukuhkan klaim superioritas status melalui penegasan modal

⁶ Ahmad Faisal and others, 'Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 8.1 (2022) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>>.

⁷ Ratnawati and Purwo Santoso, 'Gender Politics of Sultan Hamengkubuwono x in the Succession of Yogyakarta Palace', *Cogent Social Sciences*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1976966>>.

kultural tradisional berupa garis keturunan, adat-istiadat turun-temurun, dan jejaring sosial elitis sebagai basis otoritas simbolik. Di pihak lain, Ibu Safno sebagai representasi kalangan profesional urban membangun legitimasi status secara meritokratis dengan menitikberatkan pada kapital akademik, pencapaian karier, dan kompetensi profesional. Perbedaan fundamental dalam sumber legitimasi ini menciptakan benturan epistemik dimana masing-masing pihak memandang sistem nilai pihak lain sebagai ancaman terhadap hierarki status yang diyakini. Pertentangan sumber legitimasi tersebut termanifestasi secara konkret dalam tiga ranah sosiologis: pola asuh anak, interaksi sosial, dan alokasi sumber daya untuk aktivitas bernilai simbolis. Upaya Ibu Safno mengorientasikan anak pada kegiatan berbasis prestasi (seperti kompetisi ilmiah dan kursus berstandar internasional) dipersepsikan keluarga besar sebagai devaluasi terhadap warisan kultural yang menjadi basis identitas kolektif mereka. Sebaliknya, tekanan keluarga besar untuk mempertahankan ritual-ritual adat diinterpretasikan Ibu Safno sebagai bentuk dominasi simbolik yang mengerdilkan potensi mobilitas vertikal anak melalui meritokrasi. Konflik ini memperlihatkan bagaimana klaim atas modal simbolik baik yang berbasis keturunan (ascribed status) maupun pencapaian (achieved status) menjadi medan perebutan pengaruh dalam menentukan arah sosialisasi generasi penerus.

Krisis otoritas dalam dinamika keluarga ini mencapai intensitas puncak akibat proses delegitimasi timbal balik atas klaim kekuasaan masing-masing pihak. Di satu sisi, otoritas tradisional yang melekat pada figur Bapak Safno mengalami disintegrasi signifikan di hadapan istri. Legitimasi rasional yang sebelumnya mungkin menyertainya semakin terkikis secara sistematis, terutama dipicu oleh ketidakkonsistennya dalam praktik pengelolaan keuangan keluarga dan manifestasi perilaku eksekutif, seperti melakukan pengeluaran signifikan tanpa proses konsultasi demi mengejar kegiatan berkesan "prestise" yang bersifat semu. Ketidakajekan ini meruntuhkan dasar penerimaan atas kepemimpinan tradisionalnya berdasarkan norma adat.⁸ Di sisi kontradiktif, klaim otoritas rasional-legal yang diajukan Ibu Safno, yang bersandar pada kontribusi ekonomi nyata dan kompetensi yang teruji dalam pengasuhan anak, justru ditolak secara tegas oleh suami. Penolakan ini menggunakan kerangka argumentasi normatif-adat yang menegaskan kembali hierarki tradisional, sehingga mengabaikan dasar legitimasi berbasis rasionalitas dan kontrak fungsional yang diajukannya. Situasi paradoksal ini melahirkan vakum otoritas, suatu kondisi di mana tidak ada satu pun bentuk dominasi (Herrschaft) yang diakui secara mutual dan efektif. Setiap upaya mediasi pada akhirnya menemui jalan buntu karena akar konflik sesungguhnya bersumber pada benturan rezim legitimasi yang bersifat inkomensurabel yakni pertentangan mendasar antara logika otoritas tradisional dan otoritas rasional-legal sebagaimana diidentifikasi dalam tipologi weberian mengenai sumber-sumber legitimasi kekuasaan. Ketidaktersepadankan (incommensurability) kedua sistem nilai inilah yang menjadikan resolusi konflik menjadi sangat kompleks.

Proses perceraian sendiri menjadi arena perebutan kekuasaan terakhir melalui instrumen hukum.⁹ Bapak Safno memanfaatkan modal sosialnya dalam jaringan partai politik lokal untuk memengaruhi proses peradilan, sementara Ibu Safno mengoptimalkan kapital kulturalnya (penguasaan prosedur hukum, akses pada advokat profesional) untuk memperjuangkan hak ekonomi dan asuh anak. Perebutan hak asuh anak khususnya

⁸ Inten Meutia, Shelly F. Kartasari, and Zulnaldi Yaacob, 'Stakeholder or Legitimacy Theory? The Rationale behind a Company's Materiality Analysis: Evidence from Indonesia', *Sustainability (Switzerland)*, 14.13 (2022) <<https://doi.org/10.3390/su14137763>>.

⁹ Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakhriah, and Bambang Daru Nugroho, 'The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After a Divorce in the Central Aceh Regency', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21.2 (2021), 170-82 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>>.

mencerminkan konflik atas kapital simbolik masa depan, dimana masing-masing pihak melihat anak sebagai penerus legitimasi status kelompoknya. Fragmentasi keluarga besar dalam mendukung kedua belah pihak memperlihatkan bagaimana konflik mikro keluarga mereproduksi pertarungan makro antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, perceraian bukan sekadar pembubaran ikatan perkawinan, melainkan konsekuensi struktural dari kegagalan renegotiasi tatanan kekuasaan berbasis sumber daya ekonomi, status, dan otoritas yang terus berubah.

Bagaimana Pengaruh Sosial Dan Budaya Dalam Struktur Kekuasaan Patriarki Dalam Rumah Tangga

Struktur kekuasaan patriarki dalam konteks rumah tangga tidak terbentuk secara hampa atau alamiah semata, melainkan merupakan manifestasi kompleks dari konstruksi sosial-budaya yang terinternalisasi secara mendalam.¹⁰ Norma-norma budaya, nilai-nilai tradisional yang diwariskan, serta praktik-praktik sosial yang berlangsung turun-temurun berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang krusial. Melalui mekanisme ini, dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan relasi keluarga kerap disajikan dan diterima sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, tak terelakkan, dan sesuai dengan tatanan semestinya, sehingga mengaburkan akar sosialnya yang sebenarnya. Kerangka normatif yang membentuk relasi kuasa patriarkal ini secara konkret diwujudkan dan diperkuat oleh berbagai institusi dan narasi sosio-kultural. Konsep-konsep seperti "suami sebagai kepala keluarga" yang menempatkan laki-laki pada posisi pengambil keputusan utama, atau "peran domestik istri" yang membatasi perempuan pada ranah rumah tangga, bukanlah konsep netral. Konsep tersebut termuat secara eksplisit maupun implisit dalam adat istiadat, ajaran agama yang ditafsirkan secara partikular (bukan universal), dan narasi kesejarahan yang bias gender.¹¹ Kesemua elemen ini bekerja sama menciptakan suatu sistem keyakinan dan praktik yang mendefinisikan, mengatur, dan sekaligus membenarkan hierarki gender yang timpang dalam unit keluarga. Dengan demikian, dimensi sosial-budaya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konteks pasif tempat patriarki beroperasi. Lebih mendasar dari itu, ia merupakan infrastruktur simbolik yang aktif menopang dan mereproduksi hierarki patriarkal secara sistematis dan berkelanjutan. Infrastruktur ini beroperasi melalui proses sosialisasi sejak dini, tekanan untuk konformitas, pemberian sanksi sosial terhadap penyimpangan, serta pembentukan kesadaran subjektif individu. Melalui cara-cara inilah nilai-nilai dan norma patriarkal dipertahankan, dinaturalisasi, dan ditransmisikan lintas generasi, menjadikan budaya bukan sekadar latar belakang, melainkan mesin utama yang memastikan keberlangsungan struktur kekuasaan patriarki dalam rumah tangga sebagai sebuah struktur yang terus-menerus diaktifkan (enacted).

Proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak berfungsi sebagai saluran primer transmisi nilai-nilai patriarki. Melalui internalisasi peran gender berbasis budaya termasuk perbedaan eksplisit dalam pemilihan mainan (misalnya, alat masak untuk anak perempuan dan kendaraan untuk anak laki-laki), pembagian tugas domestik yang timpang, serta penanaman ekspektasi kepribadian yang dikotomis (kelembutan pada perempuan dan ketegasan pada laki-laki) terbentuklah kerangka kognitif yang mengasosiasikan jenis kelamin dengan fungsi sosial tertentu. Pola pengasuhan ini menormalisasi hierarki gender secara sistematis, menciptakan landasan bagi penerimaan terhadap peran-peran yang bersifat esensial dan membatasi ruang ekspresi individu di luar norma yang ditetapkan. Faktor sosial dan budaya juga membentuk stratifikasi ekonomi yang memperkuat ketergantungan perempuan. Budaya waris yang

¹⁰ Ikhwannuddin Harahap, 'Women'S Position in Patriarchal Kinship System', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8.1 (2020), 129-42 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.340>>.

¹¹ Siti Azisah and others, *KONSTEKTUALISASI GENDER ISLAM DAN BUDAYA*, *Buletin Al-Turas*, 2018, xvi <<https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>>.

memprioritaskan laki-laki, pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, atau stigma terhadap perempuan bekerja di ruang publik, menciptakan asimetri penguasaan sumber daya. Ketimpangan ini melanggengkan relasi kuasa patriarkal melalui mekanisme ekonomi: ketergantungan finansial istri pada suami mengurangi daya tawar dalam pengambilan keputusan domestik. Lebih jauh, kapital simbolik seperti gelar adat atau hak ritual yang sering melekat pada laki-laki mempertegas posisi superior mereka dalam hierarki keluarga. Internalisasi nilai-nilai tersebut menghasilkan konstruksi kesadaran kolektif yang memandang ketimpangan gender sebagai fenomena alamiah dan wajar, bukan sebagai produk konstruksi sosial. Kesadaran kolektif ini selanjutnya mereproduksi diri melalui mekanisme self-policing, di mana anggota keluarga (khususnya perempuan) secara sukarela mengawasi dan mengendalikan perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan standar patriarkal yang berlaku. Pengawasan mandiri ini termanifestasi dalam bentuk pengekangan aspirasi, penghindaran perilaku "nonkonformis", dan penyesuaian konstan terhadap ekspektasi sosial, sehingga mengkonsolidasi struktur dominasi tanpa perlu pengawasan eksternal yang koersif.¹² Akibatnya, kepatuhan terhadap struktur patriarki mengalami transformasi makna menjadi simbol kesalehan kultural dan kesetiaan pada tradisi. Konformitas terhadap norma gender yang timpang tidak lagi dipersepsikan sebagai bentuk subordinasi atau penindasan, melainkan dirayakan sebagai wujud tanggung jawab moral dan identitas kolektif. Proses legitimasi ini mengaburkan relasi kuasa yang asimetris dan mereduksi kritik terhadap ketidakadilan sebagai pengingkaran terhadap "kodrat" atau nilai-nilai luhur budaya. Dengan demikian, sistem patriarki tidak hanya bertahan melalui pemaksaan eksternal, tetapi juga melalui adopsi sukarela dan reproduksi nilai-nilainya oleh para subjek yang terdampak, memperpanjang siklus ketimpangan dalam bentuk yang tersublimasi.

Berbagai institusi sosial utama, termasuk agama, pendidikan, media massa, dan negara, berfungsi sebagai aparat hegemoni yang secara sistematis melanggengkan struktur patriarki dalam masyarakat. Melalui mekanisme yang kompleks dan sering kali tersamar, institusi-institusi ini tidak hanya merefleksikan nilai-nilai patriarkal yang dominan, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksinya, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan tak terelakkan. Agama, misalnya, dapat menjadi sarana legitimasi melalui interpretasi teks suci yang bias gender, menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi perannya dalam ruang publik maupun otoritas keagamaan. Pendidikan turut berkontribusi dengan kurikulum yang mengabaikan atau meminggirkan kontribusi historis dan intelektual perempuan, sehingga membentuk narasi kolektif yang maskulin-sentris. Sementara itu, media massa sering kali merepresentasikan perempuan dalam stereotip domestik yang sempit atau sebagai objek seksual, mengukuhkan persepsi publik tentang peran dan nilai perempuan yang terbatas. Negara, melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak sensitif gender atau implementasi yang diskriminatif, dapat menjadi instrumen formal penguatan ketimpangan tersebut. Keseluruhan proses ini merupakan bentuk legitimasi kultural yang efektif, di mana nilai-nilai patriarkal diinternalisasi sebagai bagian dari tatanan sosial yang wajar. Bahasa berperan sebagai instrumen kekuasaan simbolik yang krusial dalam mengonstruksi dan mempertahankan hegemoni patriarki. Kosakata, istilah, dan struktur wacana yang digunakan sehari-hari tidak sekadar menggambarkan realitas, melainkan secara aktif membentuk pemahaman dan hierarki sosial. Penggunaan istilah seperti "ibu rumah tangga" (housewife) versus "bapak pencari nafkah" (breadwinner) merupakan contoh paradigmatik. Istilah pertama cenderung menyempitkan identitas dan peran perempuan secara

¹² Dessy Kushardiyanti, Widodo Agus Setianto, and Seipah Kardipah, 'Privacy Concern Dan Isu Penipuan Berkedok Konten (Studi Etnografi Virtual Terhadap Pengguna Fitur "Add Yours" Di Instagram Stories) 1*', *Communications*, 4.1 (2022), 17–40 <<https://doi.org/Communications4.1.1>>.

eksklusif pada ranah domestik dan pekerjaan reproduktif (merawat anak, mengurus rumah), sering kali tanpa pengakuan ekonomi yang setara. Sebaliknya, istilah kedua memberikan prestise dan pengakuan sosial penuh terhadap peran laki-laki di ruang publik dan sebagai penyedia ekonomi utama. Dikotomi linguistik semacam ini bukan hanya mencerminkan pembagian peran yang timpang, tetapi lebih jauh, memperkuat dan menaturalisasi pembagian tersebut secara simbolis. Bahasa, dengan demikian, menjadi medium yang mereproduksi nilai-nilai patriarkal, menegaskan batas-batas peran gender yang kaku, dan secara implisit melegitimasi ketidaksetaraan dengan menjadikannya bagian dari logika wacana yang dominan. Interkoneksi antara aparat hegemoni institusional dan kekuasaan simbolik bahasa menghasilkan legitimasi kultural yang tangguh terhadap sistem patriarki. Legitimasi ini beroperasi bukan semata-mata melalui pemaksaan koersif, tetapi terutama melalui persuasi dan pembentukan kesadaran kolektif. Nilai-nilai patriarkal yang diinternalisasi melalui pendidikan, direpresentasikan secara bias oleh media, disakralkan oleh interpretasi agama tertentu, dan dilembagakan oleh negara, kemudian diperkuat dan direproduksi terus-menerus melalui praktik berbahasa sehari-hari. Proses ini menjadikan ketimpangan gender tampak sebagai konsekuensi alamiah dari perbedaan biologis atau tatanan sosial yang baku, bukan sebagai konstruksi sosial-historis yang dapat diubah. Akibatnya, struktur patriarki tidak hanya bertahan di tingkat ideologis, tetapi juga termanifestasi secara konkret dalam praktik sosial, kebijakan publik, relasi kuasa dalam keluarga, ketimpangan ekonomi, hingga keterbatasan akses perempuan terhadap posisi pengambilan keputusan. Legitimasi kultural yang dihasilkan oleh jalinan institusi sosial dan praktik linguistik ini menjadi kendala fundamental bagi upaya dekonstruksi dan transformasi menuju tatanan sosial yang lebih setara dan inklusif.¹³

Meskipun struktur sosial-budaya (sosbud) seringkali berperan sentral dalam melestarikan sistem patriarki,¹⁴ ia sendiri bukanlah entitas yang statis dan sepenuhnya tertutup terhadap perubahan. Terdapat potensi transformatif yang inherent di dalamnya, yang dapat dimobilisasi untuk mendekonstruksi hegemoni nilai-nilai patriarkis. Potensi ini termanifestasi melalui beberapa saluran krusial, antara lain: peningkatan kesadaran kritis yang dihasilkan oleh pendidikan yang memerdekakan, advokasi dan tekanan struktural dari gerakan sosial feminis, serta upaya reinterpretasi kreatif terhadap nilai-nilai budaya tradisional.¹⁵ Contoh konkret reinterpretasi tersebut adalah revitalisasi konsep-konsep lokal tentang keperempuanan yang berdaulat dan setara, yang selama ini mungkin terpinggirkan oleh narasi dominan patriarki. Bukti nyata bahwa patriarki bukanlah struktur monolitik yang tak tergoyahkan terlihat dari praktik negosiasi ruang yang terus-menerus dilakukan oleh perempuan di ranah mikro, khususnya dalam institusi keluarga. Partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan finansial yang sebelumnya mungkin menjadi domain eksklusif laki-laki serta penolakan tegas terhadap praktik kekerasan domestik merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang menggerogoti fondasi kekuasaan patriarkal. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan adanya dinamika dan celah (fissures) dalam hegemoni sosial dan budaya patriarki, di mana agensi perempuan dapat dimobilisasi untuk menciptakan ruang otonomi dan kesetaraan yang lebih

¹³ Lusia Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, ed. by Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia* (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020).

¹⁴ Umi Supraptiningsih and others, 'Inequality as a Cultural Construction: Women's Access to Land Rights in Madurese Society', *Cogent Social Sciences*, 9.1 (2023) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194733>>.

¹⁵ Wendy Hillman and Kylie Radel, 'The Social, Cultural, Economic and Political Strategies Extending Women's Territory by Encroaching on Patriarchal Embeddedness in Tourism in Nepal', *Journal of Sustainable Tourism Special*, 8.1 (2021), 43–65.

luas. Meskipun demikian, proses transformasi menuju relasi gender yang lebih setara ini menghadapi tantangan berat berupa inerti kultural. Nilai-nilai patriarkal lama kerap dipertahankan dengan dalih pelestarian identitas budaya atau tradisi, menjadikannya tameng yang sulit ditembus. Resistensi semacam ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan sering kali aktif dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan mempertahankan status quo.¹⁶ Oleh karena itu, upaya mendorong perubahan berkelanjutan memerlukan dekonstruksi sistematis terhadap narasi-narasi sosial dan budaya yang selama ini berfungsi menormalisasi dan melegitimasi ketidakadilan gender. Dekonstruksi ini harus bersifat multidimensi, mencakup ranah wacana, praktik kelembagaan, hingga kebijakan publik, untuk secara efektif mengikis inerti dan membangun fondasi sosial dan budaya yang berkeadilan gender.

Apa Implikasi Konflik Kekuasaan Dalam Keluarga Safno Terhadap Relasi Gender Di Lingkup Domestik Dan Publik?

Konflik kekuasaan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga Safno berpotensi besar menjadi wahana reproduksi dan penguatan hierarki gender tradisional yang bersifat timpang, khususnya pada ranah domestik. Persaingan antar anggota keluarga, terutama yang melibatkan figur laki-laki dalam memperebutkan posisi dominasi, cenderung mengaktifkan dan menegaskan kembali nilai-nilai patriarkal yang melekat dalam struktur sosial. Nilai-nilai seperti klaim otoritas berdasarkan identitas maskulin dan upaya penguasaan eksklusif atas sumber daya keluarga seringkali justru terkonsolidasi melalui dinamika konflik semacam ini, sebagai bagian dari upaya mempertahankan atau memperoleh pengaruh. Implikasi langsung dari fokus konflik yang berpusat pada perebutan dominasi antarfraksi laki-laki tersebut adalah peminggiran peran serta suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis keluarga.¹⁷ Ketika energi keluarga terserap ke dalam persaingan internal untuk dominasi maskulin, ruang partisipasi dan kontribusi pemikiran perempuan cenderung menyempit atau bahkan terabaikan. Hal ini mengakibatkan terpeliharanya struktur pengambilan keputusan yang tidak setara, di mana perempuan secara sistematis ditempatkan pada posisi yang kurang dipertimbangkan atau bersifat sekunder. Akibatnya, konflik intrakeluarga Safno yang berpusat pada rivalitas kekuasaan maskulin tersebut berpotensi mengabadikan struktur hubungan gender yang bersifat subordinatif dalam dinamika rumah tangga. Perempuan tidak hanya menghadapi keterbatasan dalam mengakses posisi pengaruh, tetapi juga mengalami pembatasan sistematis terhadap ekspresi dan kapasitas kekuasaan mereka di lingkup domestik. Dengan demikian, siklus konflik yang terjadi berisiko memperkuat rezim patriarki internal yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dan membatasi agensi mereka secara berkelanjutan.

Konflik intra-keluarga atau komunitas berpotensi menciptakan disrupsi signifikan dalam konfigurasi peran dan tanggung jawab berbasis gender di lingkup domestik. Ketegangan dan dinamika persaingan kekuasaan yang muncul acap kali berimplikasi pada pendistribusian beban yang timpang. Dalam situasi demikian, terdapat kecenderungan kuat di mana beban ganda (*double burden*) yang tidak proporsional dibebankan kepada anggota perempuan. Mereka kerap ditempatkan secara *de facto* dalam peran-peran seperti penjaga perdamaian (*peacekeeper*) yang berupaya meredakan ketegangan, sekaligus tetap memikul fungsi sebagai pengasuh utama (*primary caregiver*) bagi anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak dan lansia,¹⁸ di tengah situasi konflik yang penuh tekanan. Lebih jauh lagi, realitas ini tidak

¹⁶ Marie E. Godefroid, Ralf Plattfaut, and Björn Niehaves, 'How to Measure the Status Quo Bias? A Review of Current Literature', *Management Review Quarterly*, 73.4 (2023), 1667–1711 <<https://doi.org/10.1007/s11301-022-00283-8>>.

¹⁷ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

¹⁸ Ismene Gizelis and Xun Cao, 'A Security Dividend: Peacekeeping and Maternal Health Outcomes and Access', *Sustainability* (Switzerland), 11.1 (2020), 1–14

sekadar bermuara pada penambahan volume kerja fisik dan emosional perempuan. Ketika energi dan perhatian anggota laki-laki lebih banyak terserap dalam siklus konflik dan perebutan pengaruh atau dominasi, terjadi pelimpahan tanggung jawab domestik sehari-hari secara tidak proporsional kepada perempuan. Mereka tidak jarang terpaksa mengambil peran sebagai penanggung jawab tunggal (sole manager) atas berbagai urusan rumah tangga rutin, mulai dari pengelolaan keuangan dasar, penyediaan kebutuhan pangan, hingga pemeliharaan lingkungan tempat tinggal. Kondisi ini secara simultan memperburuk beban kerja perempuan dan mengikis kapasitas serta peluang mereka untuk berpartisipasi dalam ranah publik, pengembangan diri, atau akses terhadap sumber daya pemulihan, sehingga mempertajam kondisi kerentanan mereka. Secara struktural, dinamika semacam ini berfungsi sebagai mekanisme yang mengukuhkan (reinforcing) stereotip gender yang telah terinstitusionalisasi. Pergeseran peran di bawah tekanan konflik tersebut yang menempatkan perempuan secara eksklusif pada domain pemeliharaan hubungan (relationship maintenance) dan pengelolaan domestik (household management) secara implisit maupun eksplisit memperkuat narasi bahwa tugas-tugas tersebut merupakan ranah kodrati (natural domain) perempuan. Akibatnya, bukan hanya ketidaksetaraan dalam pembagian kerja domestik yang semakin mengeras, melainkan juga nilai-nilai patriarkal yang mendasarinya turut direproduksi. Situasi krisis justru berpotensi mengkristalisasi asimetri peran gender yang ada, menjadikan beban domestik perempuan sebagai suatu keniscayaan yang diterima (taken for granted) dan berisiko menghambat upaya transformasi menuju relasi gender yang lebih setara pascakonflik. Hal ini menciptakan siklus struktural yang sulit terputus.

Konflik internal keluarga Safno yang bersifat publik berpotensi menjadi referensi negatif bagi persepsi masyarakat mengenai kapasitas kepemimpinan perempuan. Eksposur konflik tersebut terutama jika menampilkan perempuan dalam peran yang termarginalkan atau minim pengaruh dalam resolusi dapat mengkristalkan stereotip patriarkal yang telah ada. Masyarakat mungkin melakukan generalisasi keliru bahwa ketidakmampuan menavigasi dinamika keluarga mencerminkan ketidakcakapan perempuan secara universal dalam mengelola konflik kompleks. Persepsi semacam ini mengabaikan faktor struktural dan kultural spesifik dalam dinamika keluarga Safno, sekaligus memperkuat narasi bias bahwa ruang domestik merupakan indikator valid kompetensi kepemimpinan publik. Keterlibatan perempuan dalam konflik keluarga Safno yang dipersepsikan secara tidak setara dapat berfungsi sebagai alat legitimasi tidak langsung bagi bias gender di ruang publik. Apabila figur perempuan dalam konflik tersebut dianggap tidak memiliki otoritas signifikan dalam penyelesaian masalah, masyarakat berisiko menyimpulkan reduktif bahwa perempuan secara inherent kurang kompeten dalam posisi pengambilan keputusan strategis. Asosiasi negatif ini kemudian menjadi hambatan psikososial yang membatasi pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan di ranah non-domestik. Implikasinya, peluang perempuan untuk memegang peran otoritatif dalam lembaga politik, korporasi, atau organisasi strategis lainnya dapat tergerus oleh persepsi yang lahir dari fragmentasi ruang privat keluarga tertentu. Dampak sistemik dari fenomena ini terletak pada reproduksi ketidaksetaraan struktural. Generalisasi atas konflik keluarga Safno berpotensi mengukuhkan hegemoni maskulin dalam kepemimpinan publik dengan mendiskreditkan kemampuan perempuan berdasarkan insiden terisolasi. Masyarakat mungkin menginternalisasi gagasan bahwa ketegangan dalam unit domestik membuktikan ketidakmampuan perempuan mengelola kompleksitas pada tingkat

makro.¹⁹ Akibatnya, bias ini tidak hanya memengaruhi representasi perempuan dalam posisi tinggi, tetapi juga memperlambat transformasi budaya organisasi yang inklusif. Untuk memitigasi efek ini, diperlukan kesadaran kritis bahwa kapasitas kepemimpinan bersifat individual dan konteks spesifik, bukan atribut gender yang dapat disimpulkan dari dinamika satu keluarga.

Dinamika konflik internal keluarga Safno berpotensi menjadi wahana transmisi nilai-nilai sosial yang problematis. Pola interaksi yang timpang, ditandai oleh pengabaian sistematis terhadap suara dan agensi perempuan serta dominasi melalui penggunaan kekuatan (baik fisik maupun psikologis), dapat teramati oleh masyarakat luas. Ketika pola semacam ini dipraktikkan dalam keluarga yang memiliki visibilitas dan pengaruh sosial signifikan seperti keluarga Safno, terdapat risiko besar bahwa interaksi tersebut akan diinternalisasi sebagai model relasi gender yang dapat diterima atau bahkan dianggap wajar. Proses observasi dan imitasi ini dapat mengaburkan batas antara perilaku koersif dengan dinamika keluarga yang sehat, sehingga secara tidak langsung melegitimasi ketidaksetaraan dalam struktur hubungan intim. Lebih jauh lagi, praktik-praktik dalam konflik keluarga tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan simbolik terhadap perempuan. Pengesampingan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pembatasan ekspresi, atau peminggiran peran strategis perempuan di ruang domestik mencerminkan bentuk kekerasan yang tersamar namun berdampak mendalam. Normalisasi ini tidak terbatas pada ranah privat; ia memiliki efek riak (*ripple effect*) yang memperkuat kekerasan struktural pada tataran masyarakat. Norma sosial yang mengerdilkan posisi perempuan di ruang publik seperti dunia kerja, pendidikan, dan politik dapat semakin dikukuhkan. Pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan pengembangan diri, dan posisi pengaruh dalam berbagai institusi publik menjadi lebih mudah dilegitimasi ketika fondasi ketidaksetaraan telah tertanam dan teramini melalui contoh dari figur berpengaruh. Dalam konteks yang lebih luas, potensi dampak sistemik dari dinamika ini patut menjadi perhatian serius. Ketika relasi kuasa yang timpang dan praktik koersif dalam keluarga berpengaruh seperti Safno terpapar publik tanpa kritik memadai, terjadi proses pembiasaan (*habituation*) sosial terhadap ketidakadilan gender. Hal ini berimplikasi pada pelemahan resistensi kolektif terhadap diskriminasi dan penguatan hegemoni nilai-nilai patriarkal. Akibatnya, ketidaksetaraan gender tidak hanya bertahan tetapi juga memperoleh legitimasi baru, baik dalam interaksi antarpribadi maupun dalam kebijakan dan praktik institusional. Institusi-institusi publik berisiko mereproduksi ketimpangan serupa, misalnya melalui kebijakan ketenagakerjaan yang diskriminatif, pembiaran kekerasan di lingkungan pendidikan, atau minimnya representasi perempuan dalam politik, karena norma sosial yang merendahkan martabat perempuan telah terpelihara dan terlihat "dibakukan" melalui contoh konkret dari figur-figur otoritatif.

Konflik kekuasaan intrakeluarga Safno yang terkonsentrasi pada perebutan dominasi antarfigur dominan yang umumnya maskulin secara langsung mempersempit ruang gerak dan agensi perempuan. Dalam lingkungan konflikual ini, energi keluarga lebih terfokus pada mempertahankan atau merebut hierarki kekuasaan tradisional ketimbang membuka kesempatan pengembangan diri anggota perempuan.²⁰ Akibatnya, perempuan menghadapi hambatan struktural untuk berpartisipasi penuh baik dalam ranah domestik (seperti pengambilan keputusan strategis rumah tangga) maupun ranah publik (seperti akses pendidikan lanjut, karir profesional, atau kegiatan kemasyarakatan). Dinamika ini secara sistematis

¹⁹ Gizelis and Cao.

²⁰ Elia Ardyan, Timotius F.C.W. Sutrisno, and Liestya Padmawidjaja, 'New Value Creation and Family Business Sustainability: Identification of an Intergenerational Conflict Resolution Strategy', *Heliyon*, 9.5 (2023), e15634 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15634>>.

membatasi kapasitas mereka dalam mengekspresikan otonomi dan potensi diri. Intensitas konflik kuasa dalam keluarga Safno mengakibatkan terpinggirkannya agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketika fokus utama teralihkan kepada pertarungan antarkubu kekuasaan, isu-isu mendasar seperti redistribusi peran domestik, penghapusan diskriminasi struktural, atau peningkatan representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan keluarga menjadi tidak prioritas. Lebih jauh, upaya untuk memajukan hak-hak perempuan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas konflik yang ada, sehingga secara aktif dihambat atau diabaikan. Situasi ini memperkuat siklus ketidaksetaraan dengan menempatkan kepentingan perempuan sebagai aspek sekunder yang dapat dikorbankan demi mempertahankan status quo patriarkal. Dalam ekosistem konflik kekuasaan yang sarat ketegangan, ruang untuk melakukan resistensi terhadap ketimpangan gender menjadi semakin terbatas. Perempuan yang berupaya mengadvokasi perubahan menghadapi risiko ganda: pertama, sebagai target represi dari pihak yang berkepentingan mempertahankan struktur patriarkal; kedua, sebagai korban silang (collateral damage) dalam pertarungan antarkekuasaan yang lebih besar. Resistensi pun bergeser dari upaya transformatif menjadi sekadar strategi bertahan hidup (survival tactics). Akibatnya, mekanisme perubahan struktural terhambat dan dinamika konflik justru difungsikan sebagai alat pelanggaran ketidakadilan gender melalui pembungkaman, intimidasi, atau marginalisasi suara perempuan.

PENUTUP

Konflik kekuasaan dalam keluarga Safno bersumber pada disrupsi hierarki patriarkal tradisional akibat disparitas sumber daya dan klaim legitimasi yang saling bertentangan. Dinamika ini diawali dengan monopoli otoritas Bapak Safno berdasarkan legitimasi tradisional sebagai kepala keluarga, namun mengalami disintegrasi seiring meningkatnya kontribusi ekonomi Ibu Safno melalui karir profesionalnya. Ketimpangan antara kontribusi material Ibu Safno yang signifikan dengan pengakuan otoritasnya yang terbatas dalam pengambilan keputusan strategis (seperti pengelolaan aset produktif) menciptakan inkonsistensi struktural. Ketegangan ini bereskalasi menjadi konflik terbuka karena upaya redistribusi otoritas berbasis prinsip rasional-legal (kontribusi ekonomi dan kompetensi) ditolak oleh suami yang mempertahankan klaim otoritas tradisional berbasis adat dan keturunan. Kegagalan negosiasi dan mediasi menghasilkan vakum otoritas dan disintegrasi familial, merefleksikan benturan tak terdamaikan antara dua rezim legitimasi Weberian: tradisional versus rasional-legal. Struktur kekuasaan patriarkal dalam keluarga ini diperkuat secara signifikan oleh infrastruktur sosial-budaya yang melegitimasi dan menaturalisasi ketimpangan gender. Norma adat, interpretasi agama tertentu, nilai-nilai kultural yang diwariskan (seperti superioritas garis keturunan ayah), serta praktik sosialisasi sejak dini berfungsi sebagai mekanisme yang mengukuhkan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Bahasa dengan dikotomi seperti "kepala keluarga" versus "ibu rumah tangga" serta peran institusi sosial (keluarga besar, pendidikan, media) mereproduksi hegemoni patriarki, menjadikan hierarki gender tampak alamiah dan tak terelakkan. Ketergantungan ekonomi perempuan yang terinstitusionalisasi melalui budaya waris bias gender dan pembatasan akses pendidikan/publik semakin memperlemah daya tawarnya. Internalisasi nilai-nilai patriarkal ini menghasilkan kesadaran kolektif yang memandang ketimpangan sebagai kodrat, memfasilitasi kontrol melalui self-policing dan mengubah konformitas menjadi simbol kesalehan kultural.

Implikasi konflik terhadap relasi gender di lingkup domestik bersifat multidimensi dan memperdalam ketidaksetaraan. Konflik yang berpusat pada perebutan dominasi antarfigur maskulin cenderung meminggirkan suara dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis keluarga. Dinamika konflik juga mengakibatkan pembebanan kerja

domestik dan emosional (caregiving, peacekeeping) yang tidak proporsional kepada perempuan, sehingga mengukuhkan stereotip peran gender dan membatasi peluang pengembangan diri serta partisipasi publik mereka. Lebih lanjut, pola relasi timpang dan koersif yang terpapar (seperti pengabaian suara perempuan, kontrol asimetris) berpotensi menormalisasi kekerasan simbolik dan melegitimasi ketidaksetaraan dalam hubungan intim di tingkat masyarakat yang lebih luas, melalui mekanisme observasi dan imitasi. Pada ranah publik, konflik keluarga Safno berpotensi menghasilkan dampak sistemik berupa penguatan bias gender dan hambatan bagi kepemimpinan perempuan. Eksposur konflik yang menampilkan perempuan dalam posisi termarginalkan atau minim pengaruh dapat dikristalkan menjadi stereotip umum tentang ketidakmampuan perempuan mengelola kompleksitas dan konflik, yang selanjutnya digunakan untuk mendiskreditkan kapasitas kepemimpinan mereka di ruang publik (politik, korporasi, organisasi). Generalisasi keliru ini mengabaikan konteks struktural spesifik dan berfungsi sebagai alat legitimasi tidak langsung bagi hegemoni maskulin serta bias dalam kebijakan publik (seperti representasi politik, kesetaraan di dunia kerja). Praktik ketidakadilan dalam keluarga berpengaruh juga berpotensi melemahkan resistensi sosial terhadap diskriminasi gender dan memperkuat norma yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan posisi strategis.

Meskipun struktur sosial dan budaya berperan melestarikan patriarki, terdapat potensi transformasi melalui agensi kritis dan reinterpretasi nilai. Konflik dalam keluarga Safno, meskipun berujung disintegrasi, mengungkap celah (fissures) dalam hegemoni patriarkal. Praktik negosiasi ruang oleh Ibu Safno (misalnya tuntutan kesetaraan pengelolaan keuangan, penolakan kekerasan) menunjukkan kapasitas agensi untuk menantang status quo. Potensi dekonstruksi hegemoni patriarki terletak pada pendidikan kritis, gerakan sosial feminis, dan reinterpretasi kreatif nilai-nilai budaya tradisional yang inklusif. Namun, transformasi ini menghadapi tantangan berat berupa inerti kultural, di mana nilai patriarkal kerap dipertahankan dengan dalih pelestarian identitas atau tradisi oleh kelompok berkepentingan. Upaya berkelanjutan untuk mendekonstruksi narasi legitimasi dan membangun fondasi sosial dan budaya yang berkeadilan gender di semua tingkatan (wacana, kelembagaan, kebijakan) menjadi krusial.

REFERENSI

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017
- Ardyan, Elia, Timotius F.C.W. Sutrisno, and Liestya Padmawidjaja, 'New Value Creation and Family Business Sustainability: Identification of an Intergenerational Conflict Resolution Strategy', *Heliyon*, 9 (2023), e15634 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15634>>
- Azisah, Siti, Mustari Abdullah, Himayah, and Masse Ambo, *KONSTEKTUALISASI GENDER ISLAM DAN BUDAYA*, *Buletin Al-Turas*, 2018, xvi <<https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>>
- Faisal, Ahmad, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Nova Effenty Muhammad, and Muh Rusli, 'Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 8 (2022) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>>
- Gizelis, Ismene, and Xun Cao, 'A Security Dividend: Peacekeeping and Maternal Health Outcomes and Access', *Sustainability (Switzerland)*, 11 (2020), 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

- Godefroid, Marie E., Ralf Plattfaut, and Björn Niehaves, 'How to Measure the Status Quo Bias? A Review of Current Literature', *Management Review Quarterly*, 73 (2023), 1667–1711 <<https://doi.org/10.1007/s11301-022-00283-8>>
- Hamidah Abdul Wahab, Khazriyati Salehuddin, Mohammed Azlan Mis, and Imran Ho Abdullah, 'Eufemisme Perceraian Dalam Masyarakat Melayu Sarawak: Analisis Semantik Kognitif', *GEMA Online Journal of Language Studies*, 20 (2020), 74–92
- Harahap, Ikhwanudddin, 'Women'S Position in Patriarchal Kinship System', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8 (2020), 129–42 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.340>>
- Hillman, Wendy, and Kylie Radel, 'The Social, Cultural, Economic and Political Strategies Extending Women's Territory by Encroaching on Patriarchal Embeddedness in Tourism in Nepal', *Journal of Sustainable Tourism Special*, 8 (2021), 43–65
- Kushardiyanti, Dessy, Widodo Agus Setianto, and Seipah Kardipah, 'Privacy Concern Dan Isu Penipuan Berkedok Konten (Studi Etnografi Virtual Terhadap Pengguna Fitur "Add Yours" Di Instagram Stories) 1*', *Communications*, 4 (2022), 17–40 <<https://doi.org/Communications4.1.1>>
- Kusmayanti, Hazar, Efa Laela Fakhriah, and Bambang Daru Nugroho, 'The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After a Divorce in the Central Aceh Regency', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21 (2021), 170–82 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>>
- Mañas, Carmen, María A. Martínez, and Francisca Burgueño, 'Intimate Partner Violence in Vulnerable Contexts: A Case Study', *Societies*, 13 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/soc13030053>>
- Mas'udah, Siti, 'Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia', *Millennial Asia*, 14 (2023), 5–27 <<https://doi.org/10.1177/09763996211039730>>
- Meutia, Inten, Shelly F. Kartasari, and Zulnaidi Yaacob, 'Stakeholder or Legitimacy Theory? The Rationale behind a Company's Materiality Analysis: Evidence from Indonesia', *Sustainability (Switzerland)*, 14 (2022) <<https://doi.org/10.3390/su14137763>>
- Nieswandt, Katharina, 'Instrumental Rationality in the Social Sciences', *Philosophy of the Social Sciences*, 54 (2023), 46–68 <<https://doi.org/10.1177/00483931231181930>>
- Palulungan, Lusia, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, ed. by Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia* (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020)
- Ratnawati, and Purwo Santoso, 'Gender Politics of Sultan Hamengkubuwono x in the Succession of Yogyakarta Palace', *Cogent Social Sciences*, 7 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1976966>>
- Supraptiningsih, Umi, Hasse Jubba, Erie Hariyanto, and Theadora Rahmawati, 'Inequality as a Cultural Construction: Women's Access to Land Rights in Madurese Society', *Cogent Social Sciences*, 9 (2023) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194733>>